

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD DI KABUPATEN

BATANG DAN KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2007-2016

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Lia Ayu Rokhmanasari

Nomor Mahasiswa : 14313082

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD DI KABUPATEN

BATANG DAN KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2007-2016

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhirdguna memperoleh gelar

Sarjana jenjang strata 1 di Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi,

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Lia Ayu Rokhmanasari

Nomor Mahasiswa : 14313082

Jurusan : Ilmu Ekonomi



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Penulis.
METERAI
TEMPEL
77005AEF845038593
6000
EKAM SURUPAN
Lia Ayu Rokumanasari

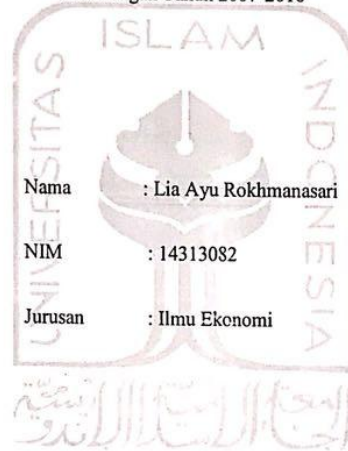


HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD di Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota

Pekalongan Tahun 2007-2016



Yogyakarta, 12 Februari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Eko Atmadji, Dr., S.E., M.Ec

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD DI KABUPATEN BATANG DAN
KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN**

Disusun Oleh : **LIA AYU ROKHMANASARI**

Nomor Mahasiswa : **14313082**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 12 Maret 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Eko Atmadji, Dr., M.Ec.

Penguji : Sarastri Mumpuni R, Dra., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran, bagaikan lampunya dan hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, dan jika ia padam kamu menjadi mati”

(Ibnu Sina)

“Jadikanlah keringat orang tuamu sebagai mutiara di dasar laut”

(Nasir Nst)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
- Kedua orang tuaku serta kakakku tersayang yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, dan kasih sayangnya hingga saat ini.
- Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.



الجمعة الإسلامية الأندونيسية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD di Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan Tahun 2007-2016”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Eko Atmadji, Dr.,S.E., M.Ec selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Dwipraptono Agus, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. Akhsyim Affandi, MA, Ph.D selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dwi Anjar Suseno, selaku Bapak Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UII.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orang tua saya yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa serta kasih sayangnya.
7. Kepada Kakak dan Sahabat-sahabatku tercinta yang telah memberikan berbagai dukungan dan motivasiserta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Penulis

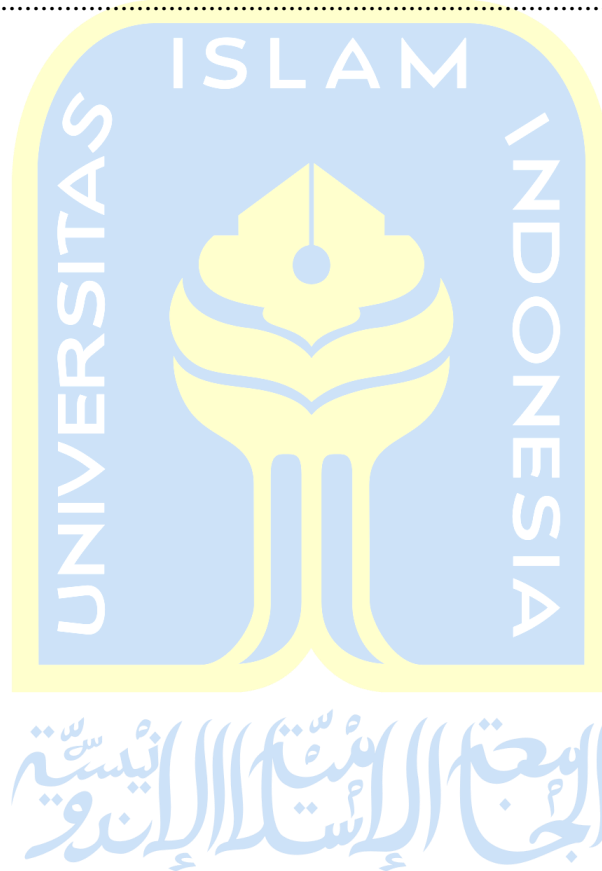
Lia Ayu Rokhmanasari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Berita Acara	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xii
Halaman Daftar Gambar	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
Halaman Abstrak	xv
BAB I _PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II _KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Desentralisasi Fiskal	14
2.2.2 Teori Perpajakan	15
2.2.3 Pendapatan Asli Daerah	17
2.2.4 Jumlah Penduduk	19
2.2.5 Pengeluaran Pemerintah	20

2.2.6 Industri.....	21
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	23
2.4 Kerangka Pemikiran	27
2.5 Hipotesis Penelitian	27
BAB III _METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis dan Sumber Data	29
3.2 Definisi Variabel Penelitian	30
3.2.1 Variabel Dependen (Y).....	30
3.2.2 Variabel Independen (X)	30
3.2 Metode Analisis Data	32
3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel.....	33
3.4 Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data.....	36
3.4.1 Chow Test.....	36
3.4.2 Hausman Test	37
3.5 Pengujian Hipotesis	38
3.5.1 Koefisien Determinan (R^2).....	38
3.5.2 Uji F.....	39
3.5.3 Uji T.....	39
BAB IV _HASIL DAN ANALISIS	41
4.1 Deskripsi Data Penelitian	41
4.2 Analisis Data	47
4.2.1 Pemilihan Model.....	47
4.3 Pengujian Hipotesis	51
4.3.1 Uji T (Pengujian Variabel Secara Individu).....	51
4.3.2 Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara Menyeluruh).....	53
4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
4.4.1 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD	55

4.4.2 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD.....	56
4.4.3 Analisis Pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap PAD	57
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Implikasi	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
Lampiran	65



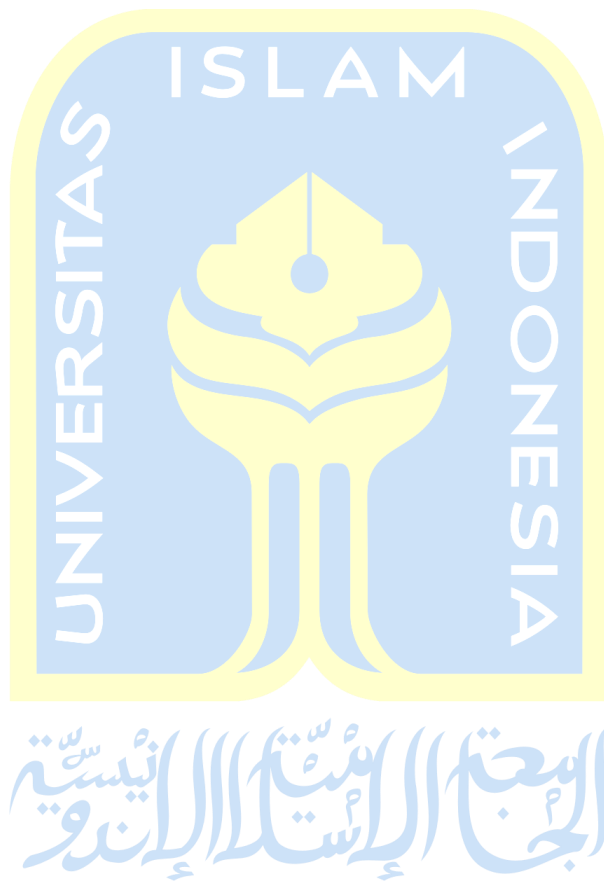
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY	6
Tabel 1.2 Data PAD di Eks Karesidenan Pekalongan.....	6
Tabel 1.3 Perkembangan PAD Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan	7
Tabel 3.1 Presentase Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.....	31
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan Tahun 2007-2016.....	42
Tabel 4.2 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan Tahun 2007-2016.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan Tahun 2007-2016.....	45
Tabel 4.4J umlah Perusahaan Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan Tahun 2007-2016.....	46
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Chow Test	48
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Fixed Effect.....	49
Tabel 4.7 Kesimpulan Hasil Uji T Statistik.....	53

الجمعة الإسلامية
الاستاذة الأندونيسية

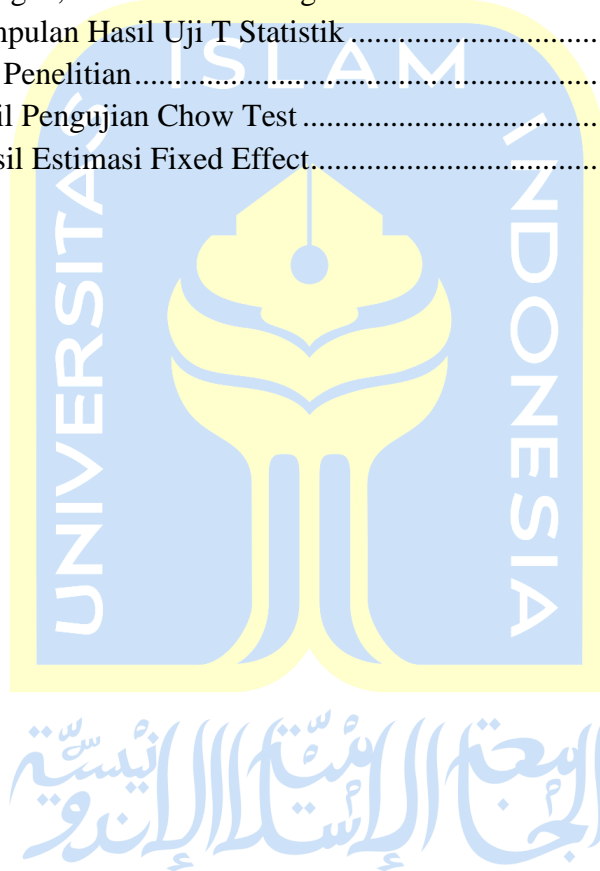
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY	65
Lampiran II Data PAD di Eks Karesidenan Pekalongan.....	66
Lampiran III Perkembangan PAD Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.....	67
Lampiran IV Presentase Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.....	68
Lampiran V Kesimpulan Hasil Uji T Statistik	69
Lampiran VI Data Penelitian.....	70
Lampiran VII Hasil Pengujian Chow Test	72
Lampiran VIII Hasil Estimasi Fixed Effect.....	73



ABSTRAK

Salah satu indikator tingkat kemandirian fiskal di suatu daerah dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah tersebut. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan jumlah perusahaan dalam sector industri terhadap PAD di Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan pada tahun 2007-2016. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten/Kota Pekalongan dan BPS Kabupaten Batang, maupun sumber lain yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan variabel jumlah penduduk dan jumlah perusahaan dalam sektor industri tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan.

Kata kunci: PAD, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Perusahaan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Perkembangan tata kelola pembangunan daerah dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia telah ditandai dengan perubahan mendasar pada dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek ekonomi. Pada aspek politik tercermin pada semakin kuatnya kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan di daerah, sedangkan dimensi ekonomi ditandai dengan adanya kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang semakin besar. Dua hal tersebut merupakan konsekuensi dari diberlakukannya UU 32/2004 dan UU 33/2004, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), mengoreksi ketimpangan antardaerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, serta keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan

pendapatan yang mereka terima dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Desentralisasi juga merupakan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggung jawaban yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan pemerintah daerah (*local government financial management*) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (Sriyana, 2011).

Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH), dan pembiayaan daerah.

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PADnya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala

kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD (Kusuma, 2016).

Peranan PAD bagi pembangunan daerah sangatlah penting khususnya untuk pemerintah kabupaten dan kota. Penerimaan Kabupaten atau Kota yang tercermin dalam APBD berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Disamping proyek pemerintah pusat dan proyek pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten atau Kota, juga terdapat proyek Kabupaten Kota yang tercermin dalam APBD Kabupaten Kota yang bersangkutan di dalamnya terdapat PAD yang bebas dipergunakan oleh Kabupaten Kota tersebut sesuai dengan skala prioritasnya (Soamole, 2013).

Pada dasarnya, besarnya PAD dipengaruhi perekonomian. Besar kecilnya PAD tergantung pada besar kecilnya perekonomian. Perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi perekonomian adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban, jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Priyono,

2013). Peranan penduduk dalam pembangunan sangat penting baik bagi swasta (pelaku ekonomi) maupun bagi pemerintah. Bagi pelaku ekonomi dapat memberikan gambaran tersedianya pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi, dan bagi pemerintah penduduk selaku obyek dan sasaran pembangunan memiliki peranan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan membuat perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan sumber pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja melalui belanja langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Suciati et.al, 2015).

Pada dasarnya agar pendapatan daerah tersebut dapat optimal, pemerintah setiap kabupaten/kota juga harus memikirkan pengeluaran yang dilakukan. Agar dalam pengeluaran pemerintah daerah dengan pendapatannya tidak terjadi defisit anggaran. Karena pengeluaran pemerintah yang seimbang akan menciptakan kondisi perekonomian yang baik. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sitaniapessy, 2013).

Penduduk sangat menentukan perekonomian di suatu daerah. Jumlah penduduk yang besar dan diimbangi dengan kesempatan kerja serta perekonomian yang stabil

akan mendorong peningkatan pembangunan daerah. Dengan dibangunnya pusat-pusat pelayanan masyarakat akan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Jumlah penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah (Asmuruf et.al, 2015). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah merupakan Pendapatan Asli Daerah terendah di Pulau Jawa setelah Provinsi DIY. Berikut merupakan data PAD di Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2010-2015.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY (Juta Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah						
Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jateng	4.785.133,23	5.564.233,15	6.629.308,01	8.212.800,64	8.347.874,67	11.696.822,24
DIY	740.202,23	867.112,89	1.004.063	1.216.102,75	1.233.738,56	1.453.213,23

Sumber: Simreg

Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan merupakan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih dalam tahap berkembang. Berikut ini merupakan data PAD di eks karesidenan Pekalongan tahun 2007-2014.

Tabel 1.2
Data PAD di Eks Karesidenan Pekalongan (Jiwa Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah							
Tahun	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kota Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kota Tegal	Kab. Brebes
2007	30.968.19	42.185.03	25.737.35	56.046.04	63.363.14	62.969.69	65.350.83
2008	41.192.71	50.136.94	30.098.04	66.737.47	68.167.04	69.567.24	71.896.76
2009	44.643.60	58.402.72	28.540.80	81.819.33	70.551.13	90.840.87	80.275.02
2010	45.421.68	67.580.92	47.493.70	76.441.04	73.061.01	101.312.86	71.025.30
2011	60.155.02	82.105.27	63.344.97	79.677.54	90.133.27	117.244.29	78.275.85
2012	84.720.04	114.793.36	91.205.78	97.951.20	118.741.62	156.663.02	101.806.85
2013	139.634.47	148.550.93	114.252.43	136.362.28	156.244.86	176.377.35	135.055.40
2014	172.638.21	153.761.07	144.075.42	117.133.68	180.429.99	166.143.02	153.413.78

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dalam Tabel 1.2 menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang diterima setiap Kabupaten dan setiap tahunnya memiliki kontribusi yang berbeda-beda untuk

Provinsi Jawa Tengah. Dari tujuh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan merupakan tiga daerah yang memiliki jumlah PAD terendah di Eks-Karesidenan Pekalongan.

Tabel 1.3
Perkembangan PAD Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	PAD					Pertumbuhan PAD (dalam %)			
	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Pekalongan	114.793	148.550	153.761	238.975	270.908	70,22	72,69	-1,36	23,46
Kota pekalongan	91.205	114.252	144.075	152.044	178.6042	91,00	26,09	5,54	17,47
Kabupaten Batang	84.720	139.634	172.638	179.973	159.105	155,46	20,30	4,10	16,82

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 disimpulkan bahwa nilai PAD dan pertumbuhan PAD Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota pekalongan cenderung mengalami perubahan yang fluktuatif. Hal tersebut disebabkan karena potensi masing-masing daerah berbeda. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi di Kabupaten Batang pada tahun 2013 sebesar 155,46% sedangkan terendah terjadi pada Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015. Pada PAD dari ketiga daerah tersebut menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN**

JUMLAH PERUSAHAAN, TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATANG, KABUPATEN PEKALONGAN DAN KOTA PEKALONGAN”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD?
- b. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PAD?
- c. Apakah jumlah perusahaan berpengaruh terhadap PAD?
- d. Apakah jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan jumlah perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi PAD?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PAD.
- c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan terhadap PAD.
- d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan jumlah perusahaan secara bersama-sama terhadap PAD.

1.4 Manfaat Penelitian

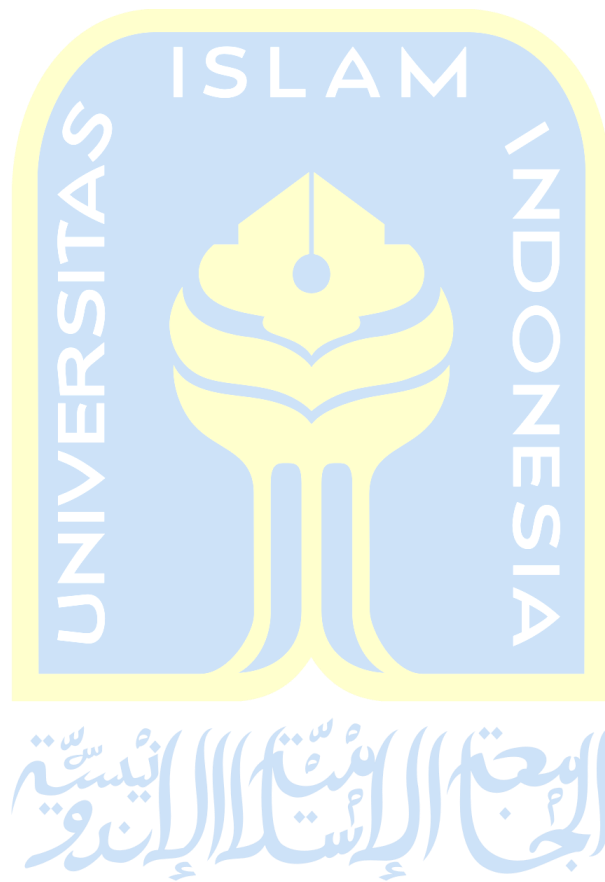
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis khususnya di bidang PAD Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota pekalongan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota pekalongan terkait pemanfaatan jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan jumlah perusahaan terhadap PAD.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab I Pendahuluan pokok bahasan yang dimuat dalam bab pendahuluan skripsi ini diuraikan mengenai beberapa komponen diantaranya latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II kajian pustaka dan landasan teori yang berisi mengenai penjelasan dan pengkajian penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dipilih sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian dan landasan teori memuat isi mengenai teori-teori yang dijadikan dasar dan landasan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori berguna untuk menerangkan hubungan antar variabel yang digunakan. BAB III metode penelitian yang berisi uraian mengenai jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan. BAB IV analisis data dan

pembahasan terdiri atas deskripsi data, pengujian hipotesis yang telah dibuat, pembahasan, hasil penelitian serta penjelasannya. BAB V kesimpulan dan implikasi, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan beserta implikasi dari jawaban rumusan masalah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian Santosa dan Rahayu (2005) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kota Kediri tahun 1989-2002. Penelitian ini menggunakan variabel independen PDRB, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah sedangkan variabel dependen adalah PAD. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD.

Asmuruf (2015) meneliti mengenai pengaruh PDRB terhadap PAD dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Kota Sorong. Metode analisisnya menggunakan metode Analisis regresi berganda melalui dua variabel yakni PDRB dan jumlah penduduk. Dari hasil penelitian tersebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong, jumlah penduduk berpengaruh terhadap (PAD) Kota Sorong.

Penelitian Sari et.al (2016) meneliti mengenai pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan retribusi daerah terhadap pendapatan

asli daerah (PAD) kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel dengan cara populasi dijadikan sampel. Data sampel diperoleh dari 19 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Penelitian ini memiliki rentang waktu 5 tahun yaitu dimulai dari tahun 2010-2014. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 sampel. Hasil penelitian adalah PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD sedangkan jumlah penduduk dan redistribusi berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian Mayza et.al (2015) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh (DKA) Provinsi Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta buku-buku pendukung, jurnal dan laporan tertulis lainnya dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel independen yaitu jumlah penduduk, PDRB, pengeluaran pemerintah dan inflasi dari tahun 2000-2013. Hasil penelitian berdasarkan Uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05

sedangkan dari Uji t menunjukkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah (PDRB) berpengaruh terhadap PAD.

Murib et.al (2016) meneliti mengenai pendapatan asli daerah di Kabupaten Nabire Papua pada tahun 2004-2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah.

Tesyningrum dan Bendesa (2016) meneliti mengenai pengaruh Pajak Hotel dan Restoran (PHR), jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan *path analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa PHR berpengaruh positif dan langsung terhadap PAD, sementara jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Pada uji selanjutnya, variabel PHR, jumlah penduduk dan PAD memiliki pengaruh positif dan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel PAD merupakan variabel intervening pengaruh positif dan tidak langsung PHR dan

jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsung PHR terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0,035, mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung PHR terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD adalah sebesar 3,5 persen. Nilai pengaruh tidak langsung jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0,007, mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD sebesar 0,7 persen.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, terdapat prinsip *money follow function* yang merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini arti bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan akan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu (Sasana, 2009):

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemungutan pajak (*taxing power*) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan asumsi dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerahnya sehingga dapat terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan negara.

2.2.2 Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro 1994). Dalam kehidupan bernegara yang layak pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Pajak di samping berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama juga berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana penerimaan pajak dikumpulkan dan apa dampaknya terhadap individu

wajib pajak maupun terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pada umumnya setiap kegiatan, termasuk pemungutan pajak, dapat dikaji atau dinilai menurut dampaknya terhadap efisiensi (tingkat output yang dihasilkan) dan distribusi (pemerataan beban dan manfaatnya) (Suparmoko, 2002).

Secara makro (regional) yaitu untuk seluruh kabupaten atau seluruh kota, pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka ini akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan regional dalam perekonomian daerah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa daerah tersebut tidak mempunyai hubungan dengan daerah lain.

Perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, untuk menabung, maupun untuk investasi. Pada umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi pengenaan pajak penghasilan oleh pemerintah pusat, kekuatan keuangan daerah akan berkurang karena kemampuan kerja wajib pajak (yang sebenarnya adalah tinggal di daerah) akan menurun, terutama untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapatan yang dikonsumsi mungkin

bertambah dengan adanya pajak-pajak daerah. Pengenaan pajak daerah akan meningkatkan bagian pendapatan yang dikonsumsi (Suparmoko, 2002).

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Sudaryo et.al, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002):

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya

pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

2.2.4 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Todaro (2006) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang maka semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreatif, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Simon juga mencatat bahwa, pertumbuhan penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong “*economic of scale*” dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi.

Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-

barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2003).

2.2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Menurut Mangkoesoebroto (1998), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,1999) :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

2.2.6 Industri

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Industri merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi spesialisasi, dalam produksi dan perdagangan

antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita mendorong perubahan struktur ekonomi. Walaupun sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi itu sendiri bukan tujuan akhir, melainkan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi (Tambunan, 2001).

Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa. Sebagai misal pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi suatu industri. Dengan adanya industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa. Menurut Hirschman, pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dulu. Dalam sektor produksi mekanisme pendorong pembangunan (*inducement mechanisme*) yang tercipta sebagai akibat dari adanya hubungan antara berbagai industri dalam menyediakan barang-barang yang digunakan sebagai bahan mentah bagi industri lainnya, dibedakan menjadi dua macam yaitu pengaruh keterkaitan ke belakang (*backward linkage effect*) dan pengaruh keterkaitan ke depan (*forward linkage effect*). Pengaruh keterkaitan ke belakang maksudnya tingkat rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri lainnya.

Sedangkan pengaruh keterkaitan ke depan adalah tingkat rangsangan yang dihasilkan oleh industri yang pertama bagi input mereka (Purnomo dan Istiqomah, 2008).

Salah satu teori yang menyebutkan industri akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Teori Kaldor. Teori Kaldor menganggap bahwa sektor industri manufaktur merupakan mesin pertumbuhan bagi sebuah wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini terdapat tiga aspek industri yang disorot. Pertama, pertumbuhan GDP memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kedua, produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan itu sendiri. Ketiga, pertumbuhan sektor non-industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan (Sholihah et.al, 2017). Jika sektor industri maju, maka PDRB akan meningkat, dengan demikian maka akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang juga akan meningkat.

2.3 Hubungan Antar Variabel

a. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD.

Di negara yang sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap

negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Priyono, 2012).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban, jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Priyono, 2012).

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris tentang pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan *output* melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar, dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi didalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Santoso dan Retno, 2005). Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat (Priyono, 2012).

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD.

Pengeluaran pemerintah lebih mempunyai hubungan yang kuat dengan PDRB atau pertumbuhan ekonomi karena belanja pembangunan ditujukan untuk membiayai fungsi *agent of development* dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan *output secara agregat*. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD (Sitaniapessy, 2013).

c. Pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap PAD.

Pemetaan industri sebagai salah satu cara untuk melihat berapa jumlah perusahaan dalam sektor industri yang ada dalam suatu daerah. Industri diklasifikasikan menjadi industri besar, menengah dan industri kecil. Daerah-daerah

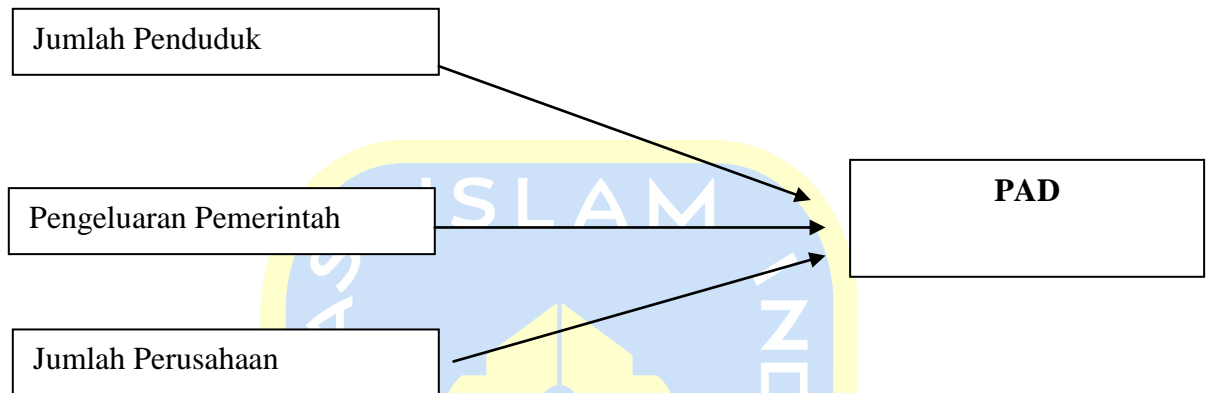
yang secara geografik memiliki ciri-ciri seragam dapat dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal. Ciri-ciri tersebut dapat bersifat ekonomi (misalnya, struktur produksi, atau pola konsumsi), juga bersifat geografik (misalnya topografi atau iklim) bahkan bersifat sosial maupun politik. Kriteria-kriteria tertentu dapat digunakan untuk menentukan daerah homogen. Misalnya keserupaan dalam tingkat pendapatan per kapita maka daerah tersebut homogen dalam tingkat pendapatan. Bila sebuah daerah memiliki kesamaan dalam kegiatan usaha (industri) maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah homogen dalam kegiatan usaha (industri) atau dengan kata lain sebagai sentra industri (Priyono, 2012).

Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat penting. Melalui kegiatan industri akan dihasilkan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari peralatan sederhana sampai peralatan modern. Dengan berkembangnya perusahaan dalam industri akan menghasilkan pajak barang maupun pajak pendapatan sehingga akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (Hertanto dan Sriyana, 2011).



2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



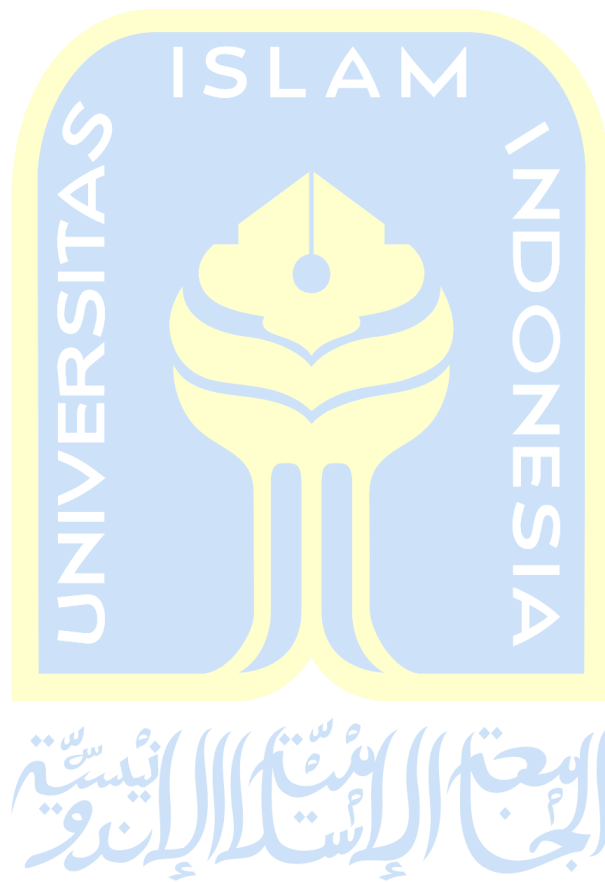
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah :

1. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.
2. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.
3. Diduga jumlah perusahaan dalam sektor industri berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

4. Diduga variabel jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan jumlah perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *panel* di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan dari tahun 2007-2016.

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh penulis merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, buku, dokumen, artikel, catatan-catatan maupun arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (Y)
- b. Jumlah Pengeluaran Pemerintah (X1)
- c. Jumlah Penduduk (X2)
- d. Jumlah Perusahaan dalam sektor industri (X3)

3.2 Definisi Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Pendapatan Asli Daerah (Y)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk variable dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) dalam ribu rupiah periode tahun 2007-2016. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hakim, 2004).

3.2.2 Variabel Independen (X)

d. Pengeluaran Pemerintah (X1)

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian tahun 2007-2016. Data yang diambil merupakan data dari BPS Kabupaten Batang, dan Kabupaten/Kota Pekalongan yang dinyatakan dalam satuan ribu rupiah.

e. Jumlah Penduduk (X2)

Jumlah penduduk adalah masyarakat yang menetap di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan tercatat sah oleh pemerintah yang dinyatakan dalam

Satuan jiwa dalam kurun waktu 2007-2016. Data diambil dari BPS Kabupaten Batang, dan Kabupaten/Kota Pekalongan.

f. Jumlah Perusahaan

Data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari jumlah perusahaan dalam industri kecil, menengah dan besar yang ada di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan pada tahun 2007-2016 dalam satuan unit. Data yang digunakan merupakan data yang diambil dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten/Kota Pekalongan dan BPS Kabupaten Batang.

Tabel 3.1
Presentase Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan

Presentase Industri terhadap PDRB (%)							
Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Batang	30,41	31,50	32,64	33,02	33,39	33,38	33,65
Kab. Pekalongan	28,54	29,75	30,43	30,88	31,25	31,24	31,35
Kota Pekalongan	19,30	19,89	20,82	21,53	21,56	21,56	21,43

Sumber: BPS Kabupaten Batang, dan Kabupaten/Kota Pekalongan

Industri di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan merupakan sektor unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB. Dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha, sektor industri setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam menyumbang terhadap PDRB. Dengan adanya jumlah

industri yang besar, maka akan meningkatkan penerimaan PDRB sehingga menyebabkan PAD yang diperoleh juga akan meningkat.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan *evIEWS 9*. Sriyana (2014) menjelaskan, data panel merupakan data gabungan antara data rentang waktu (*time series*) dengan data antar/lintas unit (*cross section*). Widarjono (2013) dalam bukunya mengatakan ada keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel, yaitu untuk mengukur pengaruh yang merupakan gabungan dari *data time series* dan *cross section* sehingga mampu menyediakan yang lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Persamaan yang digunakan yaitu

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = PAD (ribu rupiah)

X_1 = pengeluaran pemerintah (ribu rupiah)

X_2 = jumlah penduduk (jiwa)

X_3 = jumlah perusahaan (unit)

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

e = *standard error*

i = kabupaten/kota

t = tahun

Berdasarkan formulasi diatas maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini variabel dependen (Y) diengaruhi oleh variabel independen (X_1, X_2, X_3).

3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

3.3.1.1 Metode Common Effect Model/Pooled Least Square (PLS)

Metode *common effect* merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan pada waktu dan individu, sehingga dalam menganalisis data panel juga dapat menggunakan metode *ordinary*

least square (OLS). Asumsinya perilaku data dianggap sama tanpa memperhatikan kurun waktu.

3.3.1.2 Metode Fixed Effect Model (FEM)

Model *fixed effect* adalah suatu regresi yang menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama (Sriyana, 2014). Ada 2 asumsi yang ada dalam model regresi *fixed effect* yaitu:

1. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit
Intersep pada suatu hasil regresi sangat mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu, pada pendekatan *fixed effect* metode dapat dilakukan dengan variable semu (*dummy*) untuk menjelaskan perbedaan antar intersep. Model ini dapat diregresi dengan teknik *Least Squares Dummy Variabels* (LSDV).
2. Asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu/unit dan antar periode waktu.

Pendekatan dari metode estimasi regresi data panel ini adalah asumsi tentang intersep yang berubah baik antar individu obyek analisis maupun antar waktu, namun slope masih diasumsikan konstan/sama. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + U_{it}$$

$i = 1, \dots, N$ dan $t = 1, \dots, K$

Keterangan:

Y_{it} adalah variable terikat diwaktu t untuk unit *cross section* i

α_i adalah intersep yang berubah-ubah antar unit *cross section*

X_{it}^j adalah variable bebas ke-j diwaktu t untuk unit *cross section* i

β_j adalah parameter variable bebas ke-j

U_{it} adalah komponen error diwaktu t untuk unit *cross section* i

Keputusan memasukan variabel (D_i) pada pendekatan *fixed effect* tidak dapat dipungkiri akan mengurangi jumlah *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

3.3.1.3 Metode *Random Effect Model* (REM)

Metode ini memilih estimasi data panel dengan *residual* yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap subjek mempunyai intersep yang berbeda. namun demikian kita mengasumsikan setiap intersep adalah variabel *random* atau *stokastik*. Model untuk *random effect* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

3.4 Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data

Ada 3 (tiga) teknik estimasi dalam data panel, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Untuk mengetahui model mana yang akan digunakan maka perlu diadakan uji pemilihan model. Pemilihan model yang akan digunakan dalam penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Ada 2 (dua) metode yang digunakan dalam pemilihan model, yaitu:

3.4.1 Chow Test

Padachow test, pengujian F-statistik merupakan uji perbedaan dua regresi, pengujian dilakukan untuk memilih metode manakah yang digunakan oleh model *pooled least square* dan *fixed effect*. Pada setiap unit *cross section* memiliki pelaku yang sama akan tetapi kecenderungannya tidak realistis karena di setiap unit *cross section* juga memiliki pelaku yang berbeda. Dengan pengujian ini, Apakah teknik *fixed effect* lebih baik dari pada model data panel yang tidak mengandung variabel dummy, itu dapat dilihat dengan metode *residual sum of squares* (RSS). Dalam pengujiannya dengan metode ini, terdapat hipotesanya sbb:

H₀ : Model *Common Effect*

H₁ : Model *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesa H₀ (nol) telah dirumuskan dalam *chow test*, adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(RSS1 - RSS2)/m}{(RSS2)/(n - k)}$$

Dimana :

RSS1 = Residual Sum Square pendugaan model *fixed effect*

RSS2 = Residual Sum Square pendugaan model *pooled least square effect*

n = jumlah data *cross section*

m = jumlah data *time series*

k = jumlah variabel penjelas

Chow test mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (m,n,k), jika nilai Fstatistik lebih besar daripada F tabel maka hipotesa H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak sehingga model yang tepat adalah *fixed effect* dan apabila nilai F statistik lebih kecil dari F tabel maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak sehingga model yang tepat adalah *Common Effect*.

3.4.2 Hausman Test

Hausman test merupakan pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*. Ada dua hal sebagai dasar pertimbangan yaitu, (1) ada tidaknya korelasi antara *error terms* dan variabel independen X. Jika diasumsikan memiliki korelasi antar *error terms* dan variabel independen X maka model *random effect* lah yang lebih tepat, dan sebaliknya, (2) jika sampel yang diambil hanya bagian kecil dari populasi maka eror terms yang kita dapatkan bersifat random sehingga model *random effect* lebih tepat. Hausman test didasarkan pada ide bahwa LDSV di dalam *fixed effect* dan GLS

dimana GLS efisien sedangkan OLS tidak Efisien dan sebaliknya. Karena itu hausman test dapat dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Test dilakukan dengan hipotesa :

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Statistik *hausman test* mengikuti distribusi *chi square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik hausman lebih besar dari pada nilai kritisnya maka model yang paling tepat adalah *fixed effect* dan sebaliknya (Widarjono, 2013).

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Koefisien Determinan (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Kisaran nilai dari R^2 antara 0 dan 1. Dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai R^2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Begitu juga sebaliknya, seakin kecil nilai R^2 maka semakin kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dan apabila nilai R^2 sama dengan nol maka tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variable dependen.

3.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi atau tidak signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara menyeluruh. Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Diartikan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variable independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

1. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Diartikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variable independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Menemukan besarnya nilai F hitung dan signifikansi F.
3. Menentukan tingkat signifiakan (α) yaitu 5%.
4. Jika nilai Sig-F $\geq 0,05$, maka H_0 gagal ditolak, yang artinya variable independen secara serentak tidak mempengaruhi variable dependen.
5. Sebaliknya jika Sig-F $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya variable independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.3 Uji T

Uji T adalah teknik uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Langkah-langkah menguji hipotesis Uji T adalah sebagai berikut:

1. Jika hipotesis positif

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_0 : \beta_1 > 0$$

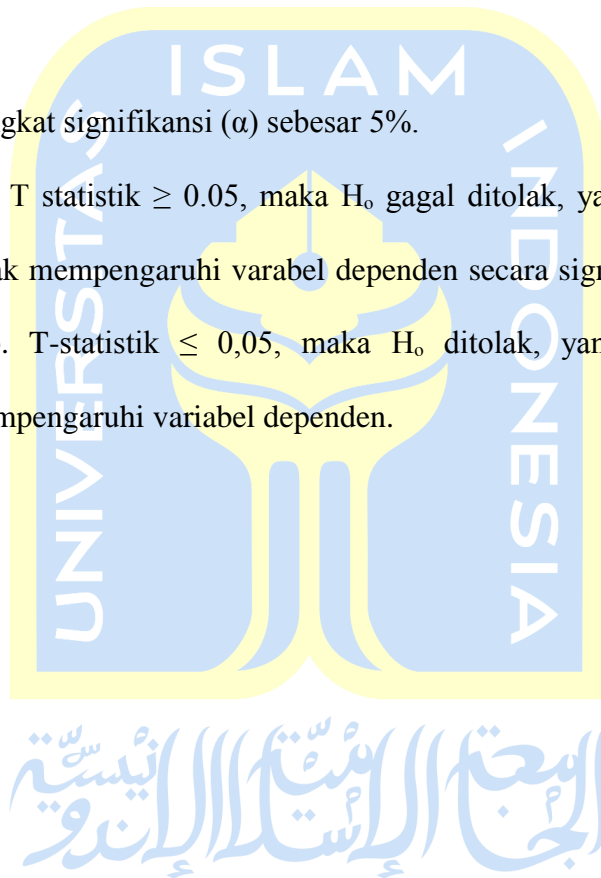
2. Jika hipotesis negatif

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_0 : \beta_1 < 0$$

3. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%.

4. Jika nilai prob. T statistik ≥ 0.05 , maka H_0 gagal ditolak, yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, jika nilai prob. T-statistik $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel (*pooled data*) dari tahun 2007-2016 dengan obyek penelitian 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Data yang diambil dari tahun 2007-2016. Data ini diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Variabel yang digunakan yaitu :

a. Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan murni yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi untuk membiayai pembangunan daerah dan aktivitas pemerintah sehingga pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan PAD di Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi dapat dilihat di tahun 2014 dan 2016 PAD di Kabupaten Batang mengalami penurunan, pada tahun 2009 PAD di Kota Pekalongan juga menurun.

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota
Pekalongan Tahun 2007-2016 (Ribu Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD
1	Kab. Batang	2007	30.968.198
		2008	41.192.714
		2009	44.643.602
		2010	45.421.689
		2011	60.155.029
		2012	84.720.049
		2013	143.502.571
		2014	172.638.217
		2015	179.973.246
		2016	209.957.559
2	Kab. Pekalongan	2007	42.208.100
		2008	50.136.941
		2009	58.402.729
		2010	67.580.923
		2011	82.105.270
		2012	114.793.366
		2013	148.550.938
		2014	153.761.072
		2015	238.975.251
		2016	270.908.898
3	Kota Pekalongan	2007	25.737.351
		2008	30.104.326
		2009	28.540.801
		2010	47.495.707
		2011	63.344.977
		2012	91.205.776
		2013	114.252.439
		2014	144.075.424
		2015	152.044.596
		2016	178.602.065

Sumber : BPS Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan

b. Variabel Independen

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang keluar dari kas daerah untuk membayar seluruh pengeluaran pemerintah seperti belanja di sektor barang dan jasa. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat pembangunan daerah dan pertumbuhan daerah. Keadaan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota Pekalongan dari tahun 2007-2016 mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2009 pengeluaran pemerintah di Kabupaten Batang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.2:

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk merupakan jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili di suatu daerah yang tercatat secara sah oleh pemerintah daerah dan memiliki mata pencaharian tetap. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan dari tahun 2007-2016 terus mengalami peningkatan. Pernyataan ini dapat dilihat dari Tabel 4.3:

3. Jumlah Perusahaan

Jumlah perusahaan merupakan jumlah industri dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya. Industri mencakup semua usaha atau kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif dan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang

sangat penting. Data yang diambil merupakan data dari jumlah industri kecil, menengah, dan besar di Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan tahun 2007-2016. Perkembangan jumlah perusahaan di daerah tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2008 di Kota Pekalongan. Pernyataan ini dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Tabel 4.2
Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota
Pekalongan Tahun 2007-2016 (Ribu Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Pengeluaran Pemerintah
1	Kabupaten Batang	2007	502.074.688
		2008	536.192.256
		2009	581.860.419
		2010	614.507.435
		2011	796.248.255
		2012	900.165.856
		2013	1.067.412.675
		2014	1.212.281.052
		2015	1.368.164.749
		2016	1.560.785.414
2	Kabupaten Pekalongan	2007	550.622.268
		2008	641.376.165
		2009	658.759.210
		2010	725.167.636
		2011	926.751.149
		2012	1.047.328.470
		2013	1.267.350.685
		2014	1.352.531.845
		2015	1.607.365.072
		2016	1.889.424.808
3	Kota Pekalongan	2007	314.877.865
		2008	397.169.873
		2009	381.134.609
		2010	420.711.865
		2011	489.616.687
		2012	561.670.029
		2013	664.175.352
		2014	762.120.861
		2015	792.543.896
		2016	922.612.237

Sumber : BPS Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota
Pekalongan Tahun 2007-2016 (Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Penduduk
1	Kabupaten Batang	2007	678.909
		2008	682.651
		2009	686.016
		2010	708.088
		2011	715.506
		2012	722.596
		2013	729.591
		2014	736.497
		2015	743.090
		2016	749.720
2	Kabupaten Pekalongan	2007	831.826
		2008	834.708
		2009	837.511
		2010	840.199
		2011	847.379
		2012	854.287
		2013	861.082
		2014	867.573
		2015	873.972
		2016	880.136
3	Kota Pekalongan	2007	271.990
		2008	273.911
		2009	276.158
		2010	281.991
		2011	285.026
		2012	288.018
		2013	290.870
		2014	293.704
		2015	296.533
		2016	307.548

Sumber : BPS Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan

Tabel 4.4
Jumlah Perusahaan Kabupaten Batang dan Kabupaten/Kota
Pekalongan Tahun 2007-2016 (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Perusahaan
1	Kabupaten Batang	2007	9.962
		2008	10.010
		2009	10.128
		2010	10.207
		2011	10.309
		2012	10.408
		2013	10.492
		2014	10.569
		2015	10.657
		2016	10.935
2	Kabupaten Pekalongan	2007	13.515
		2008	13.544
		2009	13.573
		2010	13.605
		2011	13.609
		2012	13.741
		2013	13.793
		2014	13.813
		2015	13.833
3	Kota Pekalongan	2007	1.661
		2008	1.654
		2009	1.669
		2010	1.703
		2011	1.718
		2012	1.745
		2013	2.356
		2014	2.577
		2015	3.289
		2016	3.331

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

Kabupaten/Kota Pekalongan dan BPS Kabupaten batang

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pemilihan Model

Pemilihan model dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Adapun untuk memilih model mana yang tepat digunakan perlu diuji terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan *Chow test* dan *Hausman test*.

4.1.1.1 Chow Test (Uji F Statistik)

Uji Chow test ini dilakukan untuk memilih model mana yang tepat antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Fixed Effect*, dengan uji hipotesis:

H_0 : *Common Effect* lebih tepat

H_1 : *Fixed Effect* lebih tepat

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat apakah nilai F statistik lebih besar dari F tabel sehingga H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak dan model yang tepat adalah *fixed effect*. Sedangkan apabila F statistik lebih kecil dari F tabel, maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak dan model yang tepat adalah *Common Effect*.

Nilai F statistik dan chi-square didapat dengan melakukan *Redundant Fixed Effect-Likelihood Test*/uji *Redundant fexed Effect*.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: FIXED
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.619823	(2,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	25.008813	2	0.0000

Sumber : olahan data Eviews 9

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan nilai F statistik adalah sebesar 15,619823, d.f. = (2,24) sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,40. F statistik lebih besar dari F tabel maka secara statistik H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak. Kesimpulan dari *Chow test* adalah model *Fixed Effect* lebih tepat dari model *Common Effect*, maka model estimasi yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

Hasil estimasi menggunakan *Fixed Effect* dapat dilihat pada Tabel 4.6. Berdasarkan hasil analisis *Fixed Effect* maka model pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan jumlah industri terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

$$Y = -17,41144 + 1,742030X_1 + 0,011947X_2 - 0,016338X_3 + e_{it}$$

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.41144	1.594433	-10.92014	0.0000
LOG(X1?)	1.742030	0.077530	22.46923	0.0000
LOG(X2?)	0.011947	0.035891	0.332875	0.7421
LOG(X3?)	-0.016338	0.066715	-0.244894	0.8086
Fixed Effects				
(Cross)				
_BATANG--C	-0.197181			
_KABPKL--C	-0.232969			
_KOTAPKL--C	0.430150			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.964350	Mean dependent var	18.23576	
Adjusted R-squared	0.956923	S.D. dependent var	0.697851	
S.E. of regression	0.144838	Akaike info criterion	-0.849539	
Sum squared resid	0.503476	Schwarz criterion	-0.569300	
Log likelihood	18.74309	Hannan-Quinn criter.	-0.759888	
F-statistic	129.8435	Durbin-Watson stat	1.095762	
Prob(F-statistic)	0.000000			

sumber : olahan data Eviews 9

Keterangan:

Y adalah pendapatan asli daerah (dalam ribu rupiah)

X1 adalah pengeluaran pemerintah (dalam ribu rupiah)

X2 adalah jumlah penduduk (jiwa)

X3 adalah jumlah perusahaan (unit)

4.1.1.2 Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar -17,41144 menunjukkan bahwa jika Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan tidak memiliki pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan jumlah perusahaan dalam sektor industri, maka PAD akan mengalami penurunan sebesar 17,41144%.
- b. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar 1,742030 menunjukkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah naik sebesar 1% maka PAD akan naik sebesar 1,742030 % jika variabel jumlah penduduk dan jumlah perusahaan dalam kondisi konstan. Koefisien regresi positif berarti semakin besar pengeluaran pemerintah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan maka semakin tinggi pula PAD yang diterima oleh daerah tersebut.
- c. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah, ini artinya berapapun perubahan jumlah penduduk setiap tahunnya tidak akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.
- d. Variabel jumlah perusahaan tidak mempengaruhi variabel pendapatan asli daerah. Hal ini menandakan bahwa berapapun perubahan jumlah perusahaan tiap tahunnya tidak akan memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji T (Pengujian Variabel Secara Individu)

Uji t statistik dapat dilakukan dengan uji satu sisi dengan $\alpha = 5\%$. Jika nilai t statistik $>$ nilai t tabel berarti H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai t statistik $<$ nilai t tabel maka H_0 gagal ditolak dan H_1 ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Derajat kebebasan $\alpha = 0,05$

Df $(n - k) = (30 - 4) = 26$

Nilai t tabel = 1,706

Nilai t statistik = 22,46923

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t statistik (22,46923) $>$ nilai t tabel (1,706) itu artinya H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak, maka variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Semakin tinggi jumlah pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah yang diterima.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD

Derajat kebebasan $\alpha = 0,05$

Df $(n - k) = (30 - 4) = 26$

Nilai t tabel = 1,706

Nilai t statistik = 0,332875

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t statistik (0,332875) < nilai t tabel (1,706) maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak, sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

3. Pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap PAD

Derajat kebebasan $\alpha = 5\%$

Df (n - k) = (30 - 4) = 26

Nilai t tabel = 1,706

Nilai t statistik = -0,244894

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai t statistik (-0,244894) < nilai t tabel (1,706) sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap variabel PAD. Itu artinya H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak, maka jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

Tabel 4.7
Kesimpulan Hasil Uji T Statistik

Variabel	T test	T tabel	Keterangan
X1	22,46923	1,706	Signifikan
X2	0,332875	1,706	Tidak signifikan
X3	-0,244894	1,706	Tidak Signifikan

4.3.2 Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi secara Menyeluruh)

Uji hipotesis F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan jumlah perusahaan secara bersama-sama (simultan) terhadap PAD dilakukan dengan uji F.

Hipotesis :

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Apabila nilai F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai F hitung $<$ F tabel, maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Perhitungan besarnya F tabel:

$$\alpha = 5\%$$

$$\text{Denominator (n2)} = n - k = 30 - 4 = 26$$

$$\text{Numerator (n1)} = k - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$F \text{ tabel} = 2,98$$

Hasil estimasi menggunakan model *Fixed Effect* pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai F hitung (F-statistik) sebesar 129,8435 dan diperoleh F tabel sebesar 2,98. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel sehingga H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *Fixed Effect* variabel independen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan jumlah perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan.

4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen PAD dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dari pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan jumlah perusahaan. Pada model estimasi *Fixed Effect* diketahui R^2 sebesar 0,964350, artinya variasi PAD di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan jumlah perusahaan sebesar 96,43% sedangkan sisanya sebesar 3,57% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Dilihat dari hasil estimasi model *Fixed Effect*, diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PAD pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai t statistik sebesar 22,46923, t tabel sebesar 1,706 dan koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1,742030. Artinya apabila pengeluaran pemerintah suatu daerah mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel lain dianggap konstan, maka pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 1,742030%. Begitu sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar 1% maka jumlah PAD juga akan menurun sebesar 1,742030%.

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang tinggi seperti banyaknya restoran dan hotel, maka akan meningkatkan pajak daerah, sehingga dengan adanya pajak daerah yang tinggi maka pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Peacock dan Wiseman (1961) yang menyatakan bahwa apabila masyarakat tidak merasa terbebani dengan beban pajak yang dikenakan dan masyarakat mampu untuk membayar pajak dan cukup stabil, maka terdapat hubungan antara tingkat pertumbuhan output riil dan laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, hipotesis “pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli

daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan” tidak ditolak.

4.4.2 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD

Hasil regresi menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi *Fixed Effect* sebesar 0,011947 dan t hitung sebesar 0,332875 sedangkan t tabel sebesar 1,706. Artinya besar kecilnya jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah yang diterima.

Jumlah penduduk di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap perekonomian penduduk, penduduk tidak merasakan dampak dari adanya PDRB yang tinggi. Sehingga penduduk tidak dapat berkontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayza et.al (2015) yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh. Dengan demikian hipotesis “jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah” ditolak.

4.4.3 Analisis Pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap PAD

Hasil dari regresi *Fixed effect* diketahui bahwa variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien variabel jumlah perusahaan sebesar -0,016338 dan nilai t hitung sebesar -0,033023 sedangkan t tabel sebesar 1,706. Artinya besar kecilnya jumlah perusahaan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan tidak mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah.

Jumlah perusahaan dalam sektor industri tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Hal ini dikarenakan lokasi perusahaan yang ada hanya berpusat di wilayah tertentu, tidak di semua wilayah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Pendapatan asli daerah yang diterima di daerah tersebut berbeda karena perusahaan tidak merata di semua wilayah. Dengan demikian jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murib et.al (2016) yang menyatakan bahwa variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Nabire Papua. Dengan demikian hipotesis bahwa variabel jumlah perusahaan berpengaruh positif dan terhadap PAD di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan ditolak.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang tinggi seperti banyaknya restoran dan hotel, maka akan meningkatkan pajak daerah, sehingga dengan adanya pajak daerah yang tinggi maka pendapatan asli daerah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan juga akan meningkat.

2. Variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Hal ini karena jumlah penduduk di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan yang tinggi tidak berpengaruh terhadap perekonomian penduduk, penduduk tidak merasakan

dampak dari adanya PDRB yang tinggi. Sehingga penduduk tidak dapat berkontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah.

3. Variabel jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan perusahaan yang ada hanya berpusat di wilayah tertentu, tidak semua wilayah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan terdapat perusahaan. Sehingga pendapatan asli daerah yang meningkat karena adanya perusahaan hanya disalah satu wilayah saja, tidak disemua wilayah pendapatan asli daerahnya meningkat.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil, ada beberapa implikasi mengenai pendapatan asli daerah yang harus diperhatikan. Mengingat pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sehingga pemerintah meningkatkan komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan belanja daerah khususnya belanja pembangunan. Karena dengan adanya infratsruktur yang memadai akan mendukung perekonomian, serta menyediakan sarana dan prasarana berupa infrastruktur jalan yang halus dan transportasi umum yang nyaman dan lebih baik, sehingga jalannya distribusi barang dan jasa menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan produktifitas.

Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan di daerah Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Sehingga pemerintah daerah

tersebut harus dapat mengendalikan jumlah penduduk serta memberikan pembekalan pendidikan dan keterampilan melalui pelatihan sehingga mampu bersaing di pasar kerja untuk nantinya dapat menghasilkan output secara maksimal, dengan bertambahnya kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan investasi di daerah tersebut. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah juga dengan mengintensifkan peningkatan pengawasan wajib pajak bagi para penduduk yang berada pada umur produktif dan sudah bekerja. Dengan demikian secara otomatis akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan situasi yang kondusif.

Jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan maka pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri dengan cara menambah jumlah faktor produksi, mendorong peningkatan investasi daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan Usaha-usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari sektor industri.

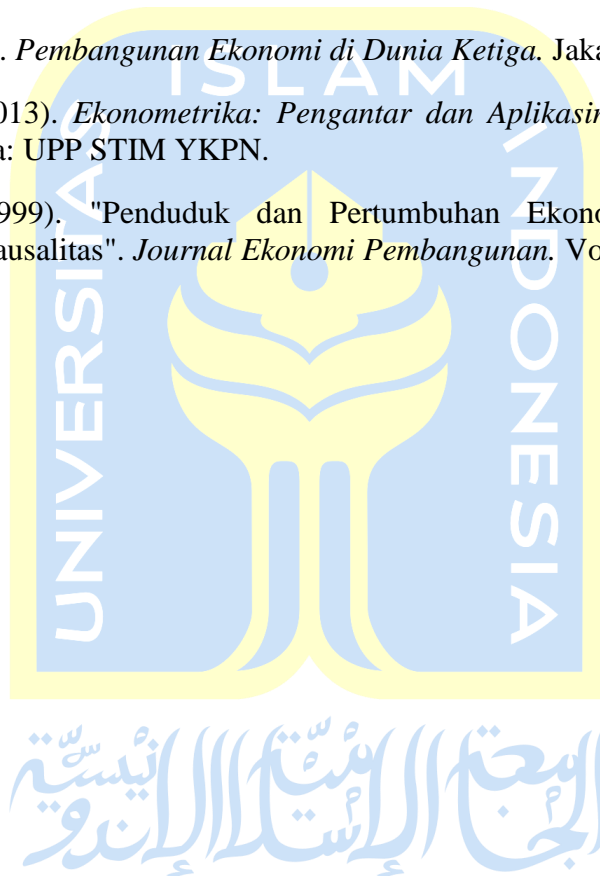
الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. (2015). "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong". *Jurnal Berkarya Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15 No. 05, hal. 727-737.
- Boediono. (1999). *Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hakim, A. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011). "Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 12. No. 1, hal. 76-89.
- Kusuma, H. (2016). "Desentralisasi Fiskal dan pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 9 No. 1, hal. 1-11.
- Mangkoesebroto, G. (1998). *Ekonomi Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2015). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3 No. 1, hal. 9-16.
- Murib, P., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2016). "Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16, No. 01, hal. 839-851.
- Pratiwi, N. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Yogyakarta : *Skripsi Sarjana (dipublikasikan)*. FE UII.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). *The Growth of Expenditure in the United Kingdom*. United States of Amerika: Princeton University Press.
- Priyono, N. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010). *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*. Vol 1, No. 1, hal. 13-26.

- Purnomo, D., & Devi, I. (2008). "Analisis Peranan Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2000 dan Tahun 2004 (Analisis Input Output)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2 , hal. 137-155.
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri". *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 2 No. 1 , hal. 9-18.
- Sari, S. M., Ethika, & Dandes. (2016). "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014". *Skripsi (dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.
- Sasana, H. (2009). "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9. No. 2 , hal. 103-124.
- Sholihah, I. M., Syaparuddin, & Nurhayani. (2017). "Analisis Investasi Sektor Industri manufaktur, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia". *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol. 12 No. 1, hal. 11-24.
- Sitaniapessy, H. A. (2013). "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD". *Jurnal Ekonomika*. Vol. 9 No. 1, hal. 38-51 .
- Soamole, M. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula)". *Jurnal Governance*. Vol. 5 No. 1, hal. 90-94.
- Soemitro, R. (1994). *Pajak Pendapatan*. Bandung: PT. Fresco.
- Sriyana, J. (2011). "Disparitas Fiskal Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 12 No. 1 , hal. 56-66.
- Suciati, D. A., Budhi, M. K., & Jayastra, K. (2015). "Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan Dan Investasi Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2007-2012". *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 20 No. 2, hal. 83-93 .
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Jakarta Press.

- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Tambunan, T. (2001). *Industri di Negara Berkembang Kami Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Tesyningrum, M. D., & Bendesa, I. K. (2017). "Pengaruh PHR dan Jumlah Penduduk Terhadap PAD Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali". *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 6 No. 2, hal. 147-177 .
- Todaro, M. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya, Edisi keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____ (1999). "Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas". *Journal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4 No. 2, hal. 147-169 .



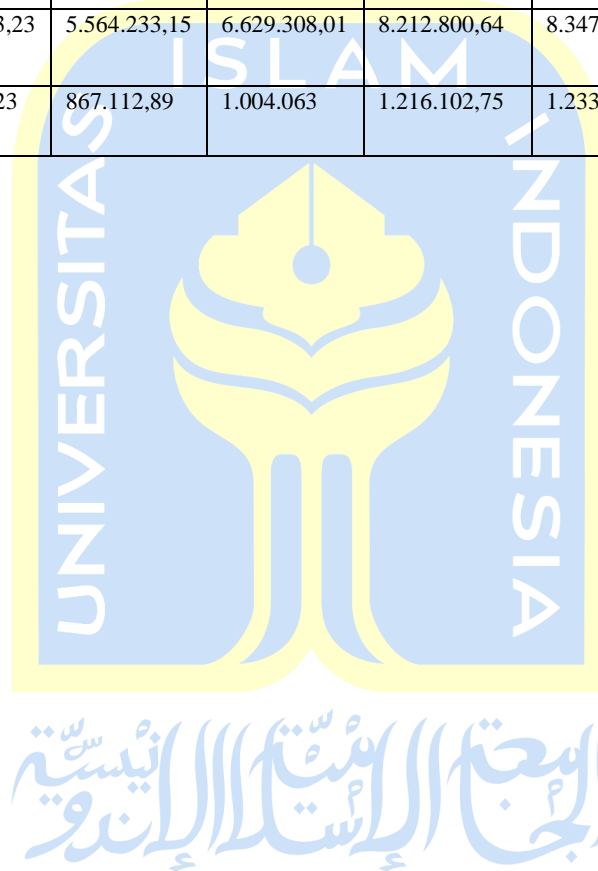


الجامعة الإسلامية
لامبران

Lampiran 1

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY (Juta Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah						
Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jateng	4.785.133,23	5.564.233,15	6.629.308,01	8.212.800,64	8.347.874,67	11.696.822,24
DIY	740.202,23	867.112,89	1.004.063	1.216.102,75	1.233.738,56	1.453.213,23



Lampiran 2
Data PAD di Eks Karesidenan Pekalongan
(Juta Rupiah)

Pendapatan Asli Daerah							
Tahun	Kab. Batang	Kab. Pekalongan	Kota Pekalongan	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kota Tegal	Kab. Brebes
2007	30.968.19	42.185.03	25.737.35	56.046.04	63.363.14	62.969.69	65.350.83
2008	41.192.71	50.136.94	30.098.04	66.737.47	68.167.04	69.567.24	71.896.76
2009	44.643.60	58.402.72	28.540.80	81.819.33	70.551.13	90.840.87	80.275.02
2010	45.421.68	67.580.92	47.493.70	76.441.04	73.061.01	101.312.86	71.025.30
2011	60.155.02	82.105.27	63.344.97	79.677.54	90.133.27	117.244.29	78.275.85
2012	84.720.04	114.793.36	91.205.78	97.951.20	118.741.62	156.663.02	101.806.85
2013	139.634.47	148.550.93	114.252.43	136.362.28	156.244.86	176.377.35	135.055.40
2014	172.638.21	153.761.07	144.075.42	117.133.68	180.429.99	166.143.02	153.413.78

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 الجامعة الإسلامية الأندونيسية

Lampiran 3

Perkembangan PAD Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan (JutaRupiah)

Kabupaten/ Kota	PAD					Pertumbuhan PAD (dalam %)			
	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Pekalongan	114.793	148.550	153.761	238.975	270.908	70,22	72,69	-1,36	23,46
Kota pekalongan	91.205	114.252	144.075	152.044	178.6042	91,00	26,09	5,54	17,47
Kabupaten Batang	84.720	139.634	172.638	179.973	159.105	155,46	20,30	4,10	16,82

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 الجامعة الإسلامية الأندونيسية

Lampiran 4

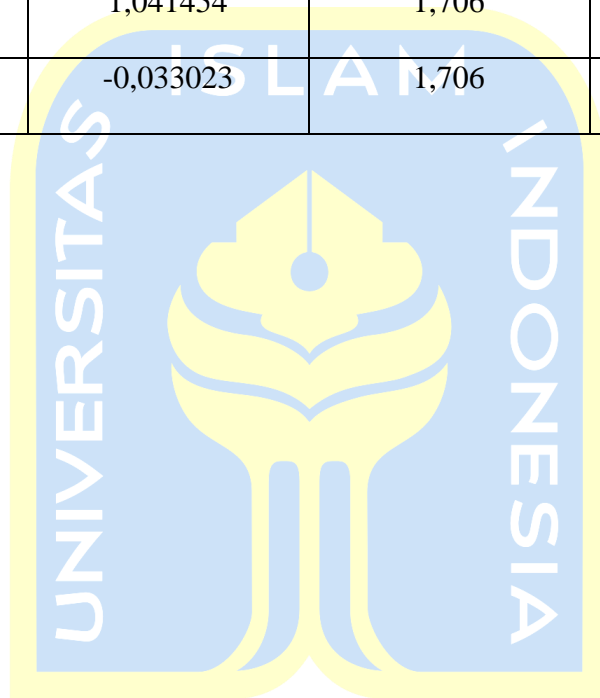
Presentase Sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan

Presentase Industri terhadap PDRB (%)							
Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Batang	30,41	31,50	32,64	33,02	33,39	33,38	33,65
Kab. Pekalongan	28,54	29,75	30,43	30,88	31,25	31,24	31,35
Kota Pekalongan	19,30	19,89	20,82	21,53	21,56	21,56	21,43

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 الجامعة الإسلامية الإندونيسية

Lampiran 5
Kesimpulan Hasil Uji T Statistik

Variabel	T test	T tabel	Keterangan
X1	20,02898	1,706	Signifikan
X2	1,041454	1,706	Tidak signifikan
X3	-0,033023	1,706	Tidak Signifikan



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Lampiran 6
Data Penelitian

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Perusahaan di Sektor Industri (Unit)
1	Kab. Batang	2007	30.968.198	502.074.688	678.909	9.962
		2008	41.192.714	536.192.256	682.651	10.010
		2009	44.643.602	581.860.419	686.016	10.128
		2010	45.421.689	614.507.435	708.088	10.207
		2011	60.155.029	796.248.255	715.506	10.309
		2012	84.720.049	900.165.856	722.596	10.408
		2013	143.502.571	1.067.412.675	729.591	10.492
		2014	172.638.217	1.212.281.052	736.497	10.569
		2015	179.973.246	1.368.164.749	743.090	10.657
		2016	209.957.559	1.560.785.414	749.720	10.935
2	Kab. Pekalongan	2007	42.208.100	550.622.268	831.826	13.515
		2008	50.136.941	641.376.165	834.708	13.544
		2009	58.402.729	658.759.210	837.511	13.573
		2010	67.580.923	725.167.636	840.199	13.605
		2011	82.105.270	926.751.149	847.379	13.609
		2012	114.793.366	1.047.328.470	854.287	13.741
		2013	148.550.938	1.267.350.685	861.082	13.793
		2014	153.761.072	1.352.531.845	867.573	13.813

		2015	238.975.251	1.607.365.072	873.972	13.833
		2016	270.908.898	1.889.424.808	880.136	13.837
3	Kota Pekalongan	2007	25.737.351	314.877.865	271.990	1.661
		2008	30.104.326	397.169.873	273.911	1.654
		2009	28.540.801	381.134.609	276.158	1.669
		2010	47.495.707	420.711.865	281.991	1.703
		2011	63.344.977	489.616.687	285.026	1.718
		2012	91.205.776	561.670.029	288.018	1.745
		2013	114.252.439	664.175.352	290.870	2.356
		2014	144.075.424	762.120.861	293.704	2.577
		2015	152.044.596	792.543.896	296.533	3.289
		2016	178.602.065	922.612.237	307.548	3.331

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 INDONESIA
 الجامعة الإسلامية
 بالاندونيسيا

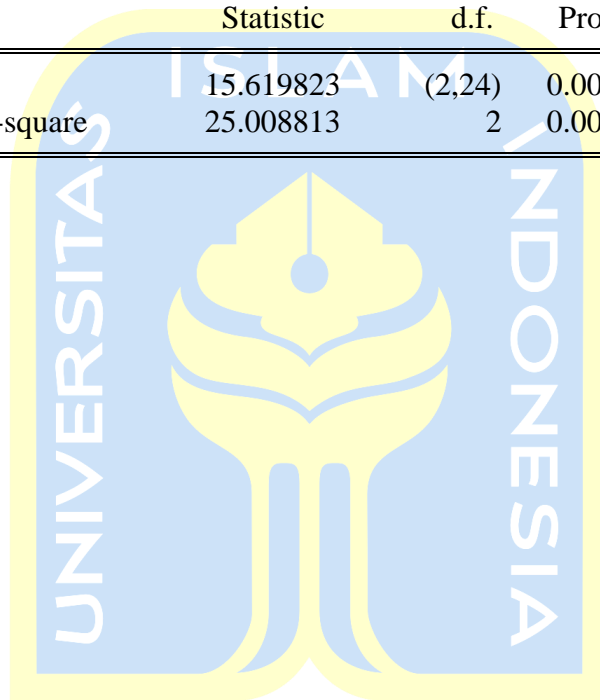
Lampiran 7**Hasil Pengujian Chow Test**

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.619823	(2,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	25.008813	2	0.0000



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Lampiran 8
Hasil Estimasi Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.41144	1.594433	-10.92014	0.0000
LOG(X1?)	1.742030	0.077530	22.46923	0.0000
LOG(X2?)	0.011947	0.035891	0.332875	0.7421
LOG(X3?)	-0.016338	0.066715	-0.244894	0.8086
Fixed Effects				
(Cross)				
_BATANG--C	-0.197181			
_KABPKL--C	-0.232969			
_KOTAPKL--C	0.430150			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.964350	Mean dependent var	18.23576	
Adjusted R-squared	0.956923	S.D. dependent var	0.697851	
S.E. of regression	0.144838	Akaike info criterion	-0.849539	
Sum squared resid	0.503476	Schwarz criterion	-0.569300	
Log likelihood	18.74309	Hannan-Quinn criter.	-0.759888	
F-statistic	129.8435	Durbin-Watson stat	1.095762	
Prob(F-statistic)	0.000000			

الجمعة الإسلامية الأندلسية